

SKRIPSI

PERANAN INSPEKTORAT TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* PADA INSTANSI PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

ITA REZKI AMALIAH



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

PERANAN INSPEKTORAT TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* PADA INSTANSI PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ITA REZKI AMALIAH

A31110273



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

PERANAN INSPEKTORAT TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* PADA INSTANSI PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

ITA REZKI AMALIAH
A31110273

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 08 Mei 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si,Ak.
NIP. 195501101987031001

Drs. Mushar Mustafa, M.M., Ak.
NIP. 195109301983031001

An. Ketua Jurusan Akuntansi
Sekertaris Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Yohanis Rura, SE.,M.SA.,AK.,CA
NIP. 196111281988111001

SKRIPSI

PERANAN INSPEKTORAT TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* PADA INSTANSI PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

ITA REZKI AMALIAH

A31110273

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **12 Juni 2014** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

| No. | Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--|------------|--------------|
| 1 | Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si,Ak. | Ketua | 1 |
| 2 | Drs. Mushar Mustafa, M.M., Ak. | Sekretaris | 2 |
| 3 | Prof. DR. H. Gagaring Pagalung, SE, MS,Ak. | Anggota | 3 |
| 4 | Drs. H. Amiruddin, M.Si, Ak. | Anggota | 4 |
| 5 | Drs. Agus Bandang, M.Si, Ak. | Anggota | 5 |

An.Ketua Jurusan Akuntansi
Sekertaris Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Yohanis Rura, SE, M.SA, Ak, CA
NIP 196111281988111001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ita Rezki Amaliah

NIM : A31110273

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**Peranan Inspektorat Terhadap Penerapan
Good Government Governance pada Instansi Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Selatan**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 02 Mei 2014

Yang Membuat Pernyataan,

ITA REZKI AMALIAH

PRAKATA

Alhamdulillah Robbil ‘Aalamiin, segala puji dan syukur tak henti peneliti panjatkan kepada Allah SWT sumber ilmu pengetahuan dan sumber segala kebenaran, karena berkat limpahan taufik dan hidayah-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Salam serta shalawat hamba panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Muahammad SAW yang telah membimbing manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dan mengajarkan ajaran Islam yang terbukti kebenarannya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Selama penulisan skripsi ini ada berbagai hambatan dan kesulitan yang peneliti hadapi. Namun, berkat petunjuk dan hidayah Allah SWT, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua yang kusayangi dan sangat kucintai, bapak Ir. Alimuddin dan ibu Ir. Nur Rachmi Ma'mur. Terimakasih atas doa, cinta, kasih sayang, dukungan, motivasi, baik secara moril dan materil yang tidak pernah henti di setiap langkahku. Terimakasih untuk semangat dan kepercayaan yang kalian berikan di setiap putus asaku.
2. Bapak Prof. DR. H. Gagaring Pagalung, SE, MS, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Nadhirah Nagu, selaku Penasehat Akademik yang dengan sabar selalu membimbing dan memberikan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti bisa berada dititik ini.

4. Bapak Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si, Ak, selaku pembimbing I yang memberikan perhatian dan waktunya, terimakasih untuk segala kebaikan, kesabaran, dan ketulusan dan semoga bisa bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
5. Bapak Drs. Mushar Mustafa, MM, Ak, selaku pembimbing II yang memberikan motivasi, waktu, dan ilmu yang bermanfaat, terimakasih untuk segala kebaikan dan keikhlasan bapak untuk membimbing peneliti.
6. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmunya kepada peneliti.
7. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu sehingga urusan administrasi peneliti menjadi lancar.
8. Terimakasih kepada adik-adikku, Faradillah dan Faradhibah, terimakasih untuk setiap canda tawa serta menjadi salah satu penyemangat sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada pimpinan dan staf Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan peneliti kesempatan dan memudahkan jalan untuk melakukan penelitian di tempat bapak/ibu.
10. Kepada responden yang bersedia membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabatku tercinta, Restu Mutmainnah, Neneng Sri Sulastri, Yuha Nadhirah, Athirah, Farah Nadiyah, dan Ulfia Darwis. Terimakasih untuk selalu ada di setiap suka dan duka, terimakasih telah menjadi sahabat-sahabat yang terbaik yang memberikan segala nasehat dan masukan serta motivasi sehingga skripsi ini bisa selesai.

12. Terimakasih Muh. Reza Aditya yang selalu ada memberikan semangat, dorongan, dan motivasi untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman P10NEER yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaan kalian, terimakasih untuk segala canda tawa, suka duka, serta segala hal yang kita lewati bersama-sama.
14. Terimakasih kepada semua pihak yang membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk segala dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materil.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, 02 Mei 2014

Peneliti

ABSTRAK

Peranan Inspektorat Terhadap Penerapan *Good Government Governance* pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

The Role of Inspectorate of the Implementation of Good Government Governance at Government Agencies of Sulawesi Selatan

Ita Rezki Amaliah
Kastumuni Harto
Mushar Mustafa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan inspektorat terhadap penerapan *good government governance* pada instansi pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Data ini diperoleh dari kuisioner yang disebar kepada audit internal di Inspektorat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh dari masing-masing variabel peranan audit internal inspektorat (x) terhadap penerapan *good government governance* (y) mempunyai arah yang positif. Variabel independen juga berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan koefisiensi transformasi regresi sebesar 1,941, hal ini menunjukkan bahwa rasio peranan inspektorat memiliki pengaruh positif terhadap penerapan *good government governance*.

Kata kunci: audit internal, inspektorat, *good government governance*

This research aims to know the effect the role of Inspectorate of the implementation of good government governance at Government Agencies of Sulawesi Selatan. The data were obtained from questionnaires were distributed to internal audit at inspectorate. The findings show that the influence of each variable internal audit inspectorate role (x) and application of good government governance (y) has a positive direction. Independent variable also have a significant effect on dependent variable because it has a significantly smaller value of 0,05. The result shows that the ratio of the role inspectorate has positive influence on application of good government governance.

Keyword : internal audit, inspectorate, *good government governance*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| PRAKATA..... | vi |
| ABSTRAK..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 3 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1 Audit Internal | 6 |
| 2.1.1 Defenisi Audit Internal | 6 |
| 2.1.2 Definisi Audit Internal pada Inspektorat | 8 |
| 2.1.3 Fungsi Audit Internal | 9 |
| 2.1.4 Misi dan Peran Auditor Internal | 10 |
| 2.1.5 Perbedaan Audit Internal dan Audit Eksternal | 11 |
| 2.1.5.1 Internal Audit | 11 |
| 2.1.5.2 Eksternal Audit | 11 |
| 2.1.6 Laporan Audit Internal..... | 11 |
| 2.2 <i>Good Government Governance</i> | 13 |
| 2.2.1 Pengertian <i>Good Government Governance</i> | 13 |
| 2.2.2 Prinsip Dasar <i>Good Government Governance</i> | 14 |
| 2.2.3 Manfaat penerapan <i>Good Government Governance</i> | 15 |
| 2.3 Definisi Inspektorat..... | 17 |
| 2.3.1 Fungsi Inspektorat | 18 |
| 2.4 Tinjauan atas Penelitian Terdahulu | 19 |
| 2.5 Kerangka Penelitian..... | 20 |
| 2.6 Hipotesis Penelitian..... | 21 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 23 |
| 3.1 Rancangan Penelitian..... | 23 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 23 |
| 3.3 Populasi dan Sampel..... | 23 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data..... | 24 |
| 3.4.1 Jenis Data..... | 24 |
| 3.4.2 Sumber Data..... | 24 |

| | |
|--|----|
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 24 |
| 3.6 Variabel Penelitian..... | 25 |
| 3.7 Instrumen Penelitian..... | 26 |
| 3.8 Uji Hipotesis..... | 27 |
| 3.8.1 Regresi Linier Sederhana (<i>Linier Regression</i>)... | 27 |
| 3.8.2 Uji R^2 (Koefisien Determinasi)..... | 28 |
| 3.8.3 Uji Statistik t..... | 28 |
| 3.9 Analisis Data..... | 28 |
| 3.9.1 Uji Kualitas Data..... | 28 |
| 3.9.2 Perhitungan Kuesioner..... | 29 |
| BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... | 30 |
| 4.1 Hasil Penelitian..... | 30 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Responden..... | 30 |
| 4.1.2 Deskripsi Identitas Responden..... | 30 |
| 4.1.3 Tanggapan Responden mengenai Peranan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Penerapan Good Government Governance..... | 32 |
| 4.1.3.1 Tanggapan Responden mengenai keefektifan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan..... | 32 |
| 4.1.3.2 Tanggapan Responden mengenai keefektifan <i>Good Government</i> <i>Governance</i> | 38 |
| 4.1.4 Uji Kualitas Data | 45 |
| 4.1.5 Uji Hipotesis..... | 49 |
| 4.2 Pembahasan..... | 51 |
| BAB V PENUTUP..... | 53 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 53 |
| 5.2 Saran..... | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | 56 |
| LAMPIRAN..... | 58 |

DAFTAR TABEL

| TABEL | HALAMAN |
|---|---------|
| 1.1 Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya..... | 20 |
| 3.1 Indikator dan Skala Pengukuran..... | 26 |
| 4.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin..... | 30 |
| 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Jabatan..... | 31 |
| 4.3 Tanggapan Responden mengenai Independensi auditor..... | 32 |
| 4.4 Tanggapan Responden mengenai Kompetensi | 34 |
| 4.5 Tanggapan Responden mengenai Program Audit Internal..... | 35 |
| 4.6 Tanggapan Responden mengenai Pelaksanaan Audit Internal..... | 36 |
| 4.7 Tanggapan Responden mengenai Laporan Audit Internal..... | 37 |
| 4.8 Tanggapan Responden mengenai Transparansi..... | 39 |
| 4.9 Tanggapan Responden mengenai Akuntabilitas..... | 40 |
| 4.10 Tanggapan Responden mengenai Responsibility..... | 42 |
| 4.11 Tanggapan Responden mengenai Independensi..... | 43 |
| 4.12 Tanggapan Responden mengenai Kewajaran..... | 44 |
| 4.13 Hasil Pengujian Validitas X..... | 46 |
| 4.14 Hasil Pengujian Validitas Y..... | 47 |
| 4.15 Hasil Uji Reabilitas..... | 48 |
| 4.16 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana..... | 49 |
| 4.17 Uji Statistik t..... | 50 |

DAFTAR GAMBAR

| GAMBAR | Halaman |
|---------------------------|---------|
| 2.1 Model Penelitian..... | 21 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|------------------------------|---------|
| 1. Biodata..... | 59 |
| 2. Kuisisioner | 60 |
| 3. Tabel Tabulasi..... | 66 |
| 4. Statistik Deskriptif..... | 69 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang *leader* atau *top* manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi dasar manajemen lainnya, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur, sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun, karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana dalam teori-teori organisasi modern.

Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah, sehingga masyarakat bertanya dimana dan kemana arah lembaga itu, sementara korupsi merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat perilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya. Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang “luar biasa“, dan biadab, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi di masa yang akan datang.

Secara naluri kegerahan masyarakat itu sebetulnya dapat dipahami, namun berbicara tentang pengawasan sebenarnya bukanlah tanggung jawab

institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab semua aparaturnya pemerintah dan masyarakat pada semua elemen. Karena institusi pengawas seperti Inspektorat Daerah, bukannya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif, adem, tetapi jauh dari anggapan itu, insan-insan pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, pembuatan pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.

Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumberdaya manusia pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinannya sampai kepada staf yang membantu dan memberikan dukungan untuk kesuksesan seorang pimpinan lembaga pengawasan. Seorang pimpinan organisasi berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, untuk itu ia harus memiliki integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga, tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah.

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah ada pengaruh Audit Internal terhadap *Good Government Governance*. Untuk itu penulis mencoba menulis dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Peranan Inspektorat terhadap Penerapan *Good Government Governance* pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.”** Penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu yang dilakukan Andini Lopang (2012).

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan *Good Government Governance* pada Inspektorat Provinsi Sul-Sel sudah diterapkan dengan efektif?
2. Apakah pelaksanaan audit internal berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keefektifan audit internal pada Inspektorat Provinsi Sul-Sel.
2. Untuk mengetahui keefektifan penerapan GGG pada Inspektorat Provinsi Sul-Sel.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penulis
 - a. Sebagai pemenuhan syarat mendapatkan gelar sarjana pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
 - b. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan realitas yang terjadi di lapangan kerja.
 - c. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis yang berkaitan dengan pengaruh Audit internal dan Pengendalian Audit terhadap penerapan *Good Government Governance*
2. Inspektorat
 - a. Mendorong Inspektorat terutama personil yang ada di dalam Audit Intern dan Pengendalian Intern untuk lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi.

- b. Meningkatkan kehandalan dan ketepatan Inspektorat dalam mengendalikan Pengendalian Internal.
- c. Dapat menjadi masukan sejauh mana pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal dapat menunjang penerapan *Good Government Governance*.
- d. Praktek, implikasi, dan penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan mutu Audit Internal, Pengendalian Internal serta penerapan *Good Government Governance*.
- e. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan wacana bagi perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan Audit Internal dan Pengendalian Internal dalam penerapan *Good Government Governance*.

4. Lembaga Pendidikan

Penulis dapat memberikan sumbangan pikiran tentang pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal dalam penerapan *Good Government Governance*.

1. 5 Sistematika Penulisan

Berikut ini penulis menyajikan uraian singkat materi pokok yang akan dibahas pada masing-masing bab sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang penulisan ini.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode analisis dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan data yang telah diperoleh sesuai dengan langkah-langkah yang telah dipersiapkan pada Bab III.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian untuk digunakan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Audit Internal

2.1.1 Defenisi Audit Internal

Menurut Dan M. Guy *at al* (2002):

“auditor internal adalah karyawan tetap yang dipekerjakan oleh suatu entitas untuk melaksanakan audit dalam organisasi tersebut. Sebagai akibatnya, mereka sangat berkepentingan dengan penentuan apakah kebijakan dan prosedur telah diikuti atau tidak serta berkepentingan dengan pengamanan aktiva organisasi.”

Menurut Yayasan Pendidikan Internal Auditor/YPIA (2004:5):

“auditor internal sebagai kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*.”

Menurut Mulyadi (2008:29) Auditor Internal adalah:

“auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau buruknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efesiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian berbagai organisasi.”

Menurut Sukrisno Agoes (2004:221):

“*internal audit* (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan.”

Definisi audit internal menurut IIA (*Institute of Internal auditor*) yang dikutip oleh Boynton (2001:980) yakni:

"Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes". (Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola)."

Menurut (Hiro Tugiman (2006:11):

"Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan))."

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa internal audit merupakan audit yang ditujukan untuk perbaikan kinerja dengan kegiatan meliputi pengujian, penilaian efektivitas dan kecukupan dalam efektivitas penerapan pengendalian intern yang ada dalam organisasi.

Definisi Audit Internal berikut diciptakan untuk menggambarkan lingkup audit internal modern yang luas dan tak terbatas eksternal (Lawrence Sawyer *et al*, 2005:10). Audit Internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan control yang berbeda-beda dalam organisasi dalam menentukan, apakah:

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan
2. Resiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisasi
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif.

Pengertian Audit Internal di atas tidak hanya mencakup peranan dan tujuan Auditor Internal, tetapi juga mengakomodasikan kesempatan dan tanggung jawab. Dalam perkembangan terkini seseorang yang melakukan peran sebagaimana seorang Auditor Internal, tidak selalu menggunakan sebutan Internal Auditor saja, namun telah meluas menjadi *control* ataupun *system analysis*.

2.1.2 Definisi Audit Internal pada Inspektorat

Dalam konteks *internal auditing* di kalangan pemerintahan di Indonesia, kiranya belumlah lengkap apabila tidak menggunakan kerangka PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam menganalisis permasalahan ini. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

“pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas: (1) tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya, dalam pasal 1 angka 3 disebutkan juga bahwa:

“pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan *audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain* terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi *dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien* untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.” Untuk itu, aparat pengawas internal dibentuk dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas pengendalian intern (pasal 47 ayat (2)).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa **aparat pengawas intern** (auditor internal pemerintah) **memiliki fungsi dan tujuan untuk memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal** pemerintah. Lebih lanjut, sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan. Poin penting dari pemahaman ini adalah, pengawas intern (dalam kerangka PP SPIP)

secara khusus diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun secara umum, pengawas intern diharapkan mampu menjadi katalis dalam pencapaian tujuan sistem pengendalian itu sendiri.

2.1.3 Fungsi Audit Internal

Pada mulanya internal auditor dalam suatu organisasi mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu mengadakan pengawasan atas pembukuan, namun sejalan dengan meningkatnya sistem informasi akuntansi, aktivitas internal auditor tidak lagi berputar pada pengawasan pembukuan semata-mata. Akan tetapi mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem organisasi, sistem internal control dan kualitas kertas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Pendapat lain tentang fungsi pemeriksaan adalah menurut *General Accounting Officer* yang diterjemahkan oleh Sumardjo Tjitrosidojo adalah sebagai berikut.

1. Menemukan berbagai situasi untuk meniadakan pemborosan dan daya guna yang tidak baik.
2. Menyarankan perbaikan dalam bidang kebijaksanaan prosedur dan struktur organisasi.
3. Menciptakan alat penguji terhadap hasil pekerjaan para individu dan berbagai unit organisasi.
4. Mengawasi ketaatan pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh anggaran dasar dan undang-undang.
5. Mencek akan adanya tindakan-tindakan yang tidak atau belum disetujui, penyelewengan dan tidak wajar secara lain.
6. Mengidentifikasi tempat-tempat yang mengandung kemungkinan timbulnya kesulitan kegiatan masa depan.
7. Menciptakan saluran komunikasi antara berbagai tingkatan dan pimpinan tertinggi.

Dari fungsi internal auditor yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fungsi internal auditor dalam suatu organisasi adalah untuk mengawasi pelaksanaan sistem pengawasan intern dan

memberikan saran perbaikan kepada manajemen bila ditemukan kelemahan dan penyimpangan, baik yang terdapat pada sistem tersebut maupun dalam pelaksanaannya dalam perusahaan.

2.1.4 Misi dan Peran Auditor Internal

Auditor Internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Audit internal bertindak sebagai penilai independent untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan control serta efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi.

Andayani (2008:3) menjelaskan tujuan audit internal meliputi penganalisan, konsultasi, menilai anggota-anggota organisasi atas efektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, menginformasikan tindakan-tindakan yang telah direview dan memberikan rekomendasi.

Dalam menjalankan tugas keseharian, Audit Internal ikut terlibat dalam memenuhi kebutuhan manajemen. Tujuan audit disesuaikan dengan tujuan manajemen, sehingga Audit Internal berada dalam hal-hal tertentu yang dianggap manajemen paling penting bagi kesuksesan organisasi, Audit Internal dapat membantu organisasi dengan cara:

- a. Mengawasi kegiatan yang tidak bisa diawasi sendiri oleh manajemen puncak
- b. Mengidentifikasi dan meminimalisir risiko
- c. Memvalidasi laporan ke pimpinan
- d. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis
- e. Membantu proses pengambilan keputusan
- f. Menganalisa masa depan bukan hanya untuk masa lalu.

2.1.5 Perbedaan Audit Internal dan Audit Eksternal

Menurut Wuryan Andayani (2008:16) menjelaskan perbedaan internal audit dan eksternal audit adalah sebagai berikut:

2.1.5.1 Internal Audit

- a. Dilakukan Oleh *Internal Auditor* yang merupakan orang dalam perusahaan
- b. Melayani kebutuhan organisasi, meskipun fungsinya harus dikelola oleh perusahaan.
- c. Fokus pada kejadian-kejadian dimasa depan dengan mengevaluasi control yang dirancang untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi.
- d. Langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah.
- e. Independen terhadap aktivitas yang diaudit, tetapi siap sedia untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan dari semua tingkatan manajemen.
- f. Menelaah aktifitas secara terus menerus.

2.1.5.2 External Audit

- a. Dilakukan Oleh *External Auditor* (KAP) yang merupakan orang luar perusahaan
- b. Melayani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang dapat diandalkan
- c. Fokus pada ketetapan dan kemudahan pemahaman dari kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dalam laporan keuangan.
- d. Mendeteksi kecurangan secara umum, tetapi akan memberi perhatian lebih jika kecurangan tersebut material.
- e. Independen terhadap manajemen dan dewan direksi baik dalam kenyataan maupun secara mental.
- f. Menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodic-biasanya sekali setahun.

2.1.6 Laporan Audit Internal

Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban hasil kerja kepada manajemen, yaitu sebagai media informasi untuk menilai sejauh mana tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan. Adapun isi atau materi laporan audit internal menurut Boynton yang diterjemahkan oleh Paul A. Rajoe (2003;495) antara lain:

1. suatu laporan yang ditandatangani harus dikeluarkan setelah pemeriksaan selesai,

2. Auditor internal harus membahas kesimpulan dan rekomendasi pada tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan tertulis yang final,
3. Laporan haruslah objektif, jelas, ringkas, konstruktif, dan tepat waktu,
4. Laporan harus menyatakan tujuan, ruang lingkup, dan hasil audit juga pendapat auditor
5. Laporan harus mencakup rekomendasi untuk perbaikan yang potensial dan mengakui kinerja serta korektif yang memuaskan
6. Pandangan tentang *auditee* tentang kesimpulan dan rekomendasi audit dapat disertakan dalam laporan audit
7. Direktur audit internal harus *me-review* dan menyetujui laporan audit final sebelum diterbitkan serta harus memutuskan kepada siapa laporan itu akan dibagikan.

Laporan audit internal merupakan suatu alat komunikasi yang didalamnya terdapat tujuan yang dimulai dari penugasan, luas pemerikaaan, batasan yang dibuat dan juga saran atau rekomendasi kepada pemimpin perusahaan. Tujuan laporan audit internal adalah sebagai berikut:

1. Laporan auditor merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan
2. menyajikan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
3. Sebagai dasar untuk kemudian diambil tindakan oleh manajemen terhadap penyimpangan yang terjadi.

Untuk mencapai tujuan dari laporan audit internal, maka laporan yang disampaikan haruslah memiliki unsur-unsur berikut.

1. Objektif

Laporan yang disusun harus mengungkapkan fakta dengan teliti berdasarkan data yang dapat diuji kebenarannya.

2. *Clear* (jelas)

Laporan disusun harus menggunakan bahasa yang jelas, tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi penggunaannya. Menerangkan dengan jelas dan lengkap agar dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang menggunakannya.

3. Ringkas

Struktur laporan yang baik melaporkan dengan jelas pelaksanaan operasional, pengendalian, dan hasil kerja. Laporan tersebut harus terhindar dari hal-hal yang tidak relevan, material seperti gagasan, temuan, kalimat, dan sebagainya yang tidak menunjang tema pokok laporan, namun tetap menjaga kualitas informasi yang disampaikan melalui laporan tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakainya.

4. Konstruktif

Laporan yang bersifat membangun adalah laporan yang sedapat mungkin memaparkan rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan operasi.

5. Tepat waktu

Laporan audit hanya dapat bermanfaat dengan maksimal bila laporan tersebut disajikan pada saat dibutuhkan. Sehingga auditor harus mampu menyajikan laporan dengan tepat waktu.

2.2 ***Good Government Governance***

2.2.1 ***Pengertian Good Government Governance***

Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep *good governance* harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (*state*)/pemerintah (*government*), swasta (*private*) dan masyarakat (*society*).

Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Good governance* telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik.

2.2.2 Prinsip Dasar *Good Government Governance*

Untuk dapat menerapkan *Good Government Governance* perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum prinsip-prinsip dasar *Good Government Governance* terdiri dari lima hal, yaitu; transparansi, integritas, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas.

Sementara *Organization for Economic Cooperation and Development* menyebutkan 4 hal pokok yang menjadi prinsip dasar *Good Government Governance*, diantaranya adalah:

1. Keadilan (*fairness*)

Melindungi segenap kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2. Tranparansi (*transparency*)

Meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) dari kinerja pemerintah daerah secara teratur dan tepat waktu (*timely basis*) serta benar (*accurate*).

3. Dapat dikontrol (*Accountability*)

Menciptakan system pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan (*distribution and balance of power*)

4. Tanggungjawab (*responsibility*)

Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan masyarakat.

2.2.3 Manfaat penerapan *Good Government Governance*

Adapun manfaat penerapan *Good Government Governance* antara lain meliputi:

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas

Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah berdasarkan *Good Government Governance* pemerintah akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh personil dipemerintah pada setiap level dan biro akan berusaha menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan pemerintahan dan bukan atas dasar mencari keuntungan

secara pribadi, dan atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan diakibatkan penggunaan sumberdaya yang dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahan daerah. Setiap personil pemerintahan yang menyumbangkan seluruh kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah juga melakukan hal sama bagi mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian penghargaan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan.

2. Meningkatkan kepercayaan publik

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Government Governance* akan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Publik dalam hal ini dapat berupa mitra pemerintah, baik sebagai investor, pemasok, pelanggan, kreditor, maupun masyarakat umum. Bagi investor dan kreditor penerapan *Good Government Governance* bagi mitranya adalah suatu hal yang mutlak untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelepasan dana investasi maupun kreditnya. Dengan menerapkan prinsip *Good Government Governance*, maka baik investor maupun kreditor akan merasa lebih aman karena pemerintah dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan semua pihak, dan bukan pihak tertentu saja. Sejalan dengan iklim globalisasi yang kita rasakan saat ini, dimana daerah wajib mampu berintegrasi dan bersaing dalam skala internasional tidak dapat dihindari lagi, yang berarti bahwa aspek *Good Government Governance* menjadi salah satu prasyarat mutlak layak operasi dan mutlak layak investasi bagi kalangan investor baik domestic maupun manca Negara.

3. Menjaga kelangsungan pemerintahan daerah

Dengan menjalankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dapat dikontrol, dan bertanggungjawab, maka kelangsungan pemerintahan dapat dijamin. Dengan prinsip keadilan tidak ada pihak yang istimewa dan tidak diistimewakan, karena apabila pemerintahan dijalankan dengan tidak adil maka akan menimbulkan pertentangan antara pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan sehingga dapat mengancam kewibawaan pemerintahan daerah. Prinsip transparansi akan memudahkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah.

4. Dapat mengukur target kinerja pemerintahan daerah

Dengan berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas, maka target kinerja pemerintah dapat diukur dan dibandingkan bila pemerintahan tidak menerapkan prinsip yang didasarkan pada *Good Government Governance*.

2.3 Definisi Inspektorat

Inspektorat jenderal (disingkat Itjen) adalah unsur pengawas pada [kementerian](#) yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementeriannya. Inspektorat jenderal dipimpin oleh seorang inspektur jenderal. Tugas dan fungsi itjen bervariasi antar kementerian. Namun pada umumnya, inspektorat jenderal menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan [kinerja](#); pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan

pemeriksaan; serta pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap semua pelaksanaan tugas unsur kementerian agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan kebijakan menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.

2.3.1 Fungsi Inspektorat

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007.

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.”

Menurut Mardiasmo (2005):

“Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan petunjuk pemeriksaan di bidang personil, keuangan, perlengkapan, pelaksanaan tugas dan fungsi BKN;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan di bidang personil, keuangan, perlengkapan, pelaksanaan tugas dan fungsi BKN;

- c. pemeriksaan pembukuan dan laporan pelaksanaan program dan anggaran BKN;
- d. penyiapan saran dan pemantauan tindak lanjut penyelesaian hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pelaksanaan pengusutan, pemeriksaan atas adanya laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan, atau wewenang dan menyiapkan usulan tindakan terhadap pegawai BKN yang terbukti melakukan perbuatan tercela atau yang terbukti melakukan tindak pidana;
- f. membina kerja sama dan melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional instansi lain mengenai pelaksanaan pengawasan pada umumnya;
- g. penyusunan dan penyiapan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala BKN;
- i. pelaksanaan tata usaha pada Inspektorat.

2.4 Tinjauan atas Penelitian Terdahulu

Menurut Andini Lopang (2012) yang meneliti tentang peranan audit internal terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT. Bank Sulselbar di Makassar. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel audit internal yang terdiri dari independensi, kompetensi, program audit internal, pelaksanaan audit internal dan laporan audit internal telah memadai dilaksanakan dengan hasil presentase sebesar 85% dan menunjukkan juga bahwa variabel *good corporate governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran telah memadai dilaksanakan dengan hasil presentase 80%.

Menurut Resa Dewitasari (2009), penelitian yang berjudul Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*, Audit internal berpengaruh positif terhadap penerapan GCG akan tetapi hasil tidak signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan GCG tidak seluruhnya hanya ditentukan oleh audit internal yang dilaksanakan auditor internal / satuan pengawasan internal (SPI), dewan komisaris, direksi, serta pengendalian internal wajib memastikan terselenggaranya penerapan GCG.

Tabel 1.1

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya

| Keterangan | Andini Lopang (2012) | Penelitian Sekarang |
|---------------------|---|---|
| Subyek penelitian | Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan perbankan. | Fokus penelitian adalah kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. |
| Variabel Penelitian | Peranan audit internal terhadap peneraapan <i>good corporate governance</i> . | Peranan audit internal terhadap penerapan <i>good government governance</i> . |
| Waktu penelitian | Penelitian dilakukan pada tahun 2012. | Penelitian dilakukan pada tahun 2014. |

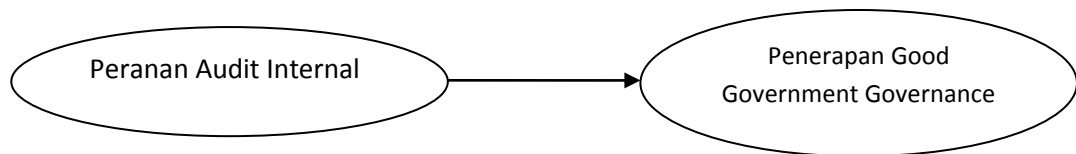
2.5 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan alur yang menggambarkan proses berpikir yang dituangkan dalam bentuk hubungan antar variable yang diteliti dan cara pengukurannya serta hasil penelitian yang diharapkan. Tujuan utama dari kerangka penelitian adalah memberikan arah dan fokus penelitian secara efektif yang didasarkan pada hasil kajian teoritik dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Manfaat utama dari kerangka penelitian yang jelas adalah peneliti dapat dengan jelas membangun hipotesis-hipotesis penelitian yang akan diuji.

Auditor internal mempunyai peranan penting terhadap tewujudnya *Good Government Governance* di lingkungan pemerintahan, karena auditor internal dalam suatu organisasi mempunyai fungsi untuk mengawasi pelaksanaan sistem pengawasan intern dan memberikan saran perbaikan kepada manajemen bila ditemukan kelemahan dan penyimpangan, baik yang terdapat pada sistem tersebut maupun dalam pelaksanaannya dalam perusahaan.

Untuk dapat menerapkan *Good Government Governance*, Auditor Internal perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum prinsip-prinsip dasar *Good Government Governance* terdiri dari lima hal, yaitu; transparansi, integritas, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas.

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu rumusan masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui pengujian-pengujian secara empiris. Berdasarkan kerangka penelitian diatas dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu maka dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut.

Fungsi internal auditor dalam suatu organisasi adalah untuk mengawasi pelaksanaan sistem pengawasan intern dan memberikan saran perbaikan kepada manajemen bila ditemukan kelemahan dan penyimpangan, baik yang terdapat pada sistem tersebut maupun dalam pelaksanaannya dalam perusahaan.

Hipotesis I : Peranan audit internal berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance*.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah berdasarkan *Good Government Governance* pemerintah akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh personil

dipemerintah pada setiap level dan biro akan berusaha menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan pemerintahan dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi, dan atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan diakibatkan penggunaan sumberdaya yang dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahan daerah. Setiap personil pemerintahan yang menyumbangkan seluruh kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah juga melakukan hal sama bagi mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian penghargaan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan.

Hipotesis II : Pelaksanaan *Good Government Governance* pada Inspektorat Provinsi Sul-Sel sudah diterapkan dengan efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan audit internal pada Inspektorat Provinsi Sul-Sel, untuk mengetahui keefektifan penerapan GGG pada Inspektorat Provinsi Sul-Sel, dan untuk mengetahui peranan audit internal dalam meningkatkan GGG pada Inspektorat Provinsi Sul-Sel.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul Peranan Audit Internal dalam Penerapan Good Government Governance ini adalah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. A.P. Pettarani No. 100 Makassar.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diteliti kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah audit internal pada Inspektorat Provinsi Sulsel.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penemuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan

mengenai objek penelitian dengan cara mengamati sebagian saja dari populasi. Karena jumlah populasi kurang dari 100 responden, maka metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sensus, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang diambil dari hasil kusioner mengenai audit internal dan *good goverment governance*.
2. Data kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk informasi, seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap obyek penelitian ini, baik melalui wawancara, kuesioner maupun dokumentasi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan dan pengumpulan dokumen-dokumen atau arsip-arsip perusahaan yang relevan dengan aktivitas konsentasi penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan diperoleh dengan pengumpulan data dan informasi dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang akan dilaksanakan dengan Tanya jawab dengan pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Kusioner, yaitu dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang dibuat dalam suatu daftar pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3.6 Variabel Penelitian

Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Audit Internal

Dalam hal ini, penulis akan menguji mengenai fungsi audit internal pada Inspektorat Provinsi Sulsel. Adapun indikator variabel audit internal yang efektif adalah sebagai berikut:

- a. Independensi
- b. Kompetensi
- c. program audit internal
- d. pelaksanaan program audit
- e. laporan audit internal.

2. *Good Government Governance*

Dalam hal ini, penulis akan menguji keefektifan penerapan *Good Government Governance* di Inspektorat Provinsi Sulsel, apakah telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Government Governance* atau sebaliknya.

Keefektifan penerapan *Good Government Governance* diukur dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. transparansi
- b. akuntabilitas
- c. responsibility
- d. indenpendensi
- e. kewajaran.

Tabel 3.1
Indikator dan Skala Pengukuran

| Variabel | Indikator | Skala Pengukuran | Instrument |
|---|--|------------------|------------|
| Keefektifan Audit Internal | a. independensi b. kompetensi c. program audit internal d. pelaksanaan program audit e. laporan audit internal | Ordinal | Kuesioner |
| Keefektifan <i>Good Government Governance</i> | a. transparansi b. akuntabilitas c. responsibility d. indenpendensi e. kewajaran | Ordinal | Kuesioner |

Sumber: google.com

3.7 Instrumen Penelitian

Instrument dalam penelitian ini adalah alat yang dipakai untuk menghimpun data. Data yang diharapkan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang berasal dari responden yang termasuk dalam sampel penelitian.

Data sekunder diperoleh dari buku-buku maupun karya ilmiah lainnya. Kuesioner adalah suatu pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap pertanyaan merupakan jawaban yang mempunyai makna.

Kuesioner yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data ini menggunakan pertanyaan tertutup yang berkaitan dengan fungsi audit internal dalam meningkatkan *Good Government Governance*. Kuesioner yang diajukan menggunakan metode pertanyaan tertutup, yaitu kemungkinan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban lain. Dalam pertanyaan tertutup, penulis menyediakan alternative jawaban (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju.

3.8 Uji Hipotesis

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dapat diproses sesuai dengan jenis data dan kemudian disajikan dalam bentuk table dan angka dalam metode statistik, sebagai berikut.

3.8.1 Regresi Linier Sederhana (*Linier Regression*)

Analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variable bebas (X) dengan variable terikat (Y). adapun persamaan regresi linier sederhana dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana: Y = variable terikat

a = nilai konstanta

b = koefisien arah regresi

X = variable bebas

3.8.2 Uji Statistik t

Uji t atau *test of significance* digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh variable independen berpengaruh terhadap variable dependen bersifat menentukan (signifikacant) atau tidak, dengan criteria berdasarkan nilai signifikansi $<0,05$, maka variable independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen dan sebaliknya, jika nilai signifikansinya $>0,05$, maka variable independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen (Santoso, 2000:168).

3.9 Analisis Data

3.9.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas Data

Uji validitas adalah untuk mengetahui sah tidaknya instrumen kuisisioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti (Ghozali, 2006).

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah One Shot, artinya satu kali pengukuran saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan

bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel (Nunnally dalam Ghazali, 2006).

3.9.2 Perhitungan Kuesioner

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data, yaitu:

- a. tabulasikan jawaban kuesioner
- b. kelompokkan jawaban kuesioner
- c. jumlahkan skor masing-masing kelompok jawaban kuesioner
- d. total skor secara keseluruhan
- e. bandingkan total skor setuju dan sangat setuju dengan total skor keseluruhan
- f. buat kesimpulan mengenai hasil kusioner.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Responden

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebarakan melalui *contact person* kepada aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi reponden dalam penelitian ini adalah auditor internal pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 36 orang. Dari 36 kuisisioner yang dibagikan kepada responden, semua responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian.

4.1.2 Deskripsi Identitas Responden

Gambaran umum responden dapat dilihat melalui demografi responden yang meliputi: jenis kelamin dan jabatan responden. Untuk lebih jelasnya gambaran umum responden dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Responden

Dalam bagian ini responden dibagi menjadi kelompok jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Pembagiannya dapat diliat pada table berikut ini:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis kelamin | Frekuensi responden | |
|---------------|---------------------|-----|
| | orang | % |
| Laki-laki | 21 | 58 |
| perempuan | 15 | 42 |
| total | 36 | 100 |

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Data diatas menunjukkan bahwa dari 36 responden yang terpilih, maka sebanyak 21 orang atau 58% didominasi oleh responden laki-laki dan sisanya sebanyak 15 orang atau 42% perempuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata audit internal yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan adalah laki-laki.

2. Jabatan

Responden pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi beberapa kelas jabatan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda, yaitu: auditor, auditor madya, auditor muda, staff evaluasi dan pelaporan, fungsional umum, dan inspektur pembantu wilayah II. Adapun pembagiannya sebagai berikut.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden berdasarkan Jabatan

| jabatan | Frekuensi Responden | |
|-------------------------------|---------------------|-----|
| | orang | % |
| auditor | 13 | 36 |
| auditor madya | 7 | 19 |
| auditor muda | 7 | 19 |
| staff evaluasi dan pelaporan | 5 | 14 |
| fungsional umum | 3 | 9 |
| inspektur pembantu wilayah II | 1 | 3 |
| total | 36 | 100 |

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Dari data diatas dapat menunjukkan bahwa dari 36 responden, jabatan responden didominasi oleh auditor sebanyak 13 orang atau 36%, auditor madya sebanyak 7 orang atau 19%, auditor muda sebanyak 7 orang atau 19%, staff evaluasi dan pelaporan sebanyak 5 orang atau 14%, fungsional umum sebanyak 3 orang atau 9%, dan inspektur pembantu wilayah II sebanyak 1 orang atau 3%.

4.1.3 Tanggapan Responden mengenai Peranan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Penerapan Good Government Governance

4.1.3.1 Tanggapan Responden mengenai keefektifan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 36 responden melalui penyebaran kuisioner, untuk mendapatkan kecenderungan jawaban masing-masing variable akan didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana terlihat pada uraian berikut ini.

a. Tanggapan responden mengenai Independensi

Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi auditor internal untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, auditor internal tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi harus bersikap independen. Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang dicirikan oleh pendekatan integritas dan obyektivitas tugas profesionalnya.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan tanggapan responden mengenai independensi yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Tanggapan Responden mengenai Independensi Auditor

| No. | Pernyataan | Scoring Responden mengenai Independensi | | | | |
|-----|---|---|----|-----|-----|-----|
| | | STS | TS | N | S | SS |
| 1. | Kedudukan unit internal audit terpisah dari bagian-bagian yang diperiksanya. | 8% | 3% | 3% | 61% | 25% |
| 2. | Auditor internal pernah mendapatkan kesulitan dalam mewawancarai orang-orang yang bekerja pada bagian yang sedang di audit. | 6% | 8% | 22% | 61% | 3% |
| 3. | Auditor internal bertanggung jawab kepada unit internal audit. | 8% | - | 12% | 68% | 12% |

| | | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|-----|----|
| 4. | Auditor internal mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah seorang pimpinan atau staf dari objek yang sedang di audit. | 22% | 39% | 14% | 19% | 6% |
| 5. | Auditor internal mempunyai akses kepada komite pengawasan | 8% | 3% | 25% | 61% | 3% |

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Berdasarkan tanggapan responden mengenai independensi auditor, maka untuk pertanyaan Kedudukan unit internal audit terpisah dari bagian-bagian yang diperiksa, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni sebanyak 22 orang (61%). Indikator kedua Auditor internal pernah mendapatkan kesulitan dalam mewawancarai orang-orang yang bekerja pada bagian yang sedang di audit, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni sebanyak 22 orang (61%). Indikator ketiga Auditor internal bertanggung jawab kepada unit internal audit, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni sebanyak 25 orang (68%). Indikator keempat Auditor internal mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah seorang pimpinan atau staf dari objek yang sedang di audit, sebagian besar responden memberikan jawaban tidak setuju yakni sebanyak 14 orang (39%). Indikator kelima Auditor internal mempunyai akses kepada komite pengawasan, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni sebanyak 22 orang (61%).

b. Tanggapan Responden mengenai Kompetensi

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor, disamping itu auditor juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena selama masa pemeriksaan banyak dilakukan wawancara dan permintaan keterangan dari auditan untuk memperoleh data.

Untuk mengetahui sejauh mana Kompetensi auditor pada Inspektorat Prov. Sulawesi Selatan, maka hasil selengkapnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Tanggapan Responden mengenai Kompetensi

| No. | Pernyataan | Scoring Responden mengenai Kompetensi | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|----|----|-----|-----|
| | | STS | TS | N | S | SS |
| 6. | Auditor internal memiliki latar belakang pendidikan kecakapan professional yang memadai dalam hal audit. | 6% | 6% | 3% | 61% | 25% |
| 7. | Auditor internal memiliki pengalaman dibidang audit. | 8% | 3% | 3% | 72% | 14% |
| 8. | Auditor internal mempunyai kemampuan komunikasi dengan orang lain secara efektif. | 8% | 6% | 6% | 66% | 14% |
| 9. | Auditor internal teliti dalam melaksanakan tugasnya | 6% | 3% | 8% | 63% | 20% |

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Berdasarkan tanggapan responden mengenai Kompetensi, maka untuk indikator pertama Auditor internal memiliki latar belakang pendidikan kecakapan professional yang memadai dalam hal audit, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni sebanyak 22 orang (61%). Indikator kedua Auditor internal memiliki pengalaman dibidang audit, rata-rata responden memberikan jawaban setuju yakni 26 orang (72%). Indikator ketiga Auditor internal mempunyai kemampuan komunikasi dengan orang lain secara efektif, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 24 orang (66%). Indikator keempat Auditor internal teliti dalam melaksanakan tugasnya, jawaban responden didominasi oleh jawaban setuju yakni 23 orang (63%).

c. Tanggapan Responden mengenai Program Audit Internal

Program audit internal merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif. Selain itu berfungsi sebagai alat perencanaan yang juga penting untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan, menelaah pekerjaan yang telah dilakukan.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan tanggapan responden mengenai program audit internal sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden mengenai Program Audit Internal

| No. | Pernyataan | Scoring Responden mengenai Program Audit Internal | | | | |
|-----|--|---|----|-----|-----|-----|
| | | STS | TS | N | S | SS |
| 10. | Dalam program audit terdapat evaluasi terhadap kegiatan operasional audit. | 6% | 6% | 19% | 55% | 14% |
| 11. | Batasan pemeriksaan ditetapkan secara jelas. | 12% | | | 63% | 25% |
| 12. | Program pemeriksaan dilakukan review secara terus menerus. | 8% | 3% | 8% | 58% | 23% |
| 13. | Program audit disusun sebelum audit dilakukan. | 12% | - | - | 50% | 38% |

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Berdasarkan tanggapan responden mengenai program audit internal, maka untuk indikator pertama Dalam program audit terdapat evaluasi terhadap kegiatan operasional audit, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 20 orang (55%). Indikator kedua Batasan pemeriksaan ditetapkan secara jelas, rata-rata responden memberikan jawaban setuju yakni 23 orang (63%). Indikator ketiga Program pemeriksaan dilakukan review secara terus menerus, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 21 orang

(58%). Dan indikator keempat Program audit disusun sebelum audit dilakukan, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 18 orang (50%).

d. Tanggapan Responden mengenai Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan kegiatan audit internal merupakan tahapan-tahapan penting yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses auditing untuk menentukan prioritas, arah, dan pendekatan dalam proses auditor internal. Ada 4 tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal, yaitu tahap perencanaan audit, tahap pengujian dan pengevaluasian informasi, tahap penyampaian hasil audit, dan tahap tindak lanjut (*follow up*) hasil audit. Untuk lebih jelasnya akan disajikan tanggapan responden mengenai pelaksanaan audit internal sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden mengenai Pelaksanaan Audit Internal

| No. | Pernyataan | Scoring Responden mengenai Pelaksanaan Audit Internal | | | | |
|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|
| | | STS | TS | N | S | SS |
| 14. | Pelaksanaan audit didasarkan pada program yang telah disusun sebelumnya. | 8% | 3% | - | 59% | 30% |
| 15. | Tahap-tahap pelaksanaan audit mendapatkan pengawasan yang efektif. | 6% | 6% | - | 50% | 38% |
| 16. | Pelaksanaan audit dilakukan minimal 6 bulan sekali. | 13% | 13% | 24% | 28% | 22% |
| 17. | Dalam pelaksanaan audit dilakukan evaluasi terhadap risiko yang berkaitan dengan sistem informasi, efektifitas dan efisiensi operasi sesuai dengan hukum, undang-undang dan keamanan asset. | 3% | 8% | 6% | 63% | 20% |

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Berdasarkan tanggapan responden mengenai pelaksanaan audit internal, dapat kita lihat pada indikator pertama Pelaksanaan audit didasarkan pada program yang telah disusun sebelumnya, sebagian besar responden memberikan jawaban

setuju yakni sebanyak 21 orang (59%). Indikator kedua Tahap-tahap pelaksanaan audit mendapatkan pengawasan yang efektif, dapat dilihat bahwa rata-rata responden memberikan jawaban setuju yakni 18 orang (50%). Indikator ketiga Pelaksanaan audit dilakukan minimal 6 bulan sekali, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 11 orang (28%). Indikator keempat Dalam pelaksanaan audit dilakukan evaluasi terhadap risiko yang berkaitan dengan sistem informasi, efektifitas dan efisiensi operasi sesuai dengan hukum, undang-undang dan keamanan asset, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 23 orang (63%).

e. Tanggapan Responden mengenai Laporan Audit Internal

Laporan audit internal merupakan saran pertanggungjawaban internal auditor atas penugasan pemeriksaan oleh pimpinan. Melalui laporan ini internal auditor akan mengungkapkan dan menguraikan kelemahan yang terjadi dan keberhasilan yang dicapai. Laporan harus disusun, sehingga pimpinan dapat mengerti permasalahan dan segera mengambil keputusan mengenai tindakan seperlunya. Berikut ini akan disajikan tanggapan responden mengenai laporan auditor internal.

Tabel 4.7
Tanggapan Responden mengenai Laporan Audit Internal

| No. | Pernyataan | Scoring Responden mengenai Laporan Audit Internal | | | | |
|-----|---|--|----|---|-----|-----|
| | | STS | TS | N | S | SS |
| 18. | Laporan dikeluarkan setelah audit selesai. | 8% | - | - | 44% | 48% |
| 19. | Laporan disusun secara objektif, singkat dan jelas. | 8% | - | - | 62% | 30% |
| 20. | Laporan audit memberikan arah bagi manajemen untuk mengambil keputusan. | 8% | - | - | 69% | 29% |

| | | | | | | |
|-----|---|----|----|---|-----|-----|
| 21. | Laporan audit menyajikan temuan-temuan audit hasil pelaksanaan audit. | 6% | 6% | - | 53% | 35% |
|-----|---|----|----|---|-----|-----|

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Berdasarkan Tanggapan responden mengenai laporan audit internal, untuk indikator pertama Laporan dikeluarkan setelah audit selesai, sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju yakni 17 orang (48%). Indikator kedua Laporan disusun secara objektif, singkat dan jelas, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 22 orang (62%). Indikator ketiga Laporan audit memberikan arah bagi manajemen untuk mengambil keputusan, rata-rata responden memberikan jawaban setuju yakni 23 orang (63%). Dan terakhir, indikator keempat Laporan audit menyajikan temuan-temuan audit hasil pelaksanaan audit, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 19 orang (53%).

4.1.3.2 Tanggapan Responden mengenai keefektifan *Good Government Governance*

Untuk melihat keefektifan penerapan *Good Government Governance* pada Inspektorat Prov. Sulawesi Selatan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 36 responden melalui penyebaran kuisioner, untuk mendapatkan kecenderungan jawaban masing-masing variable akan didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana terlihat pada uraian berikut ini.

a. Tanggapan Responden mengenai Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan tanggapan responden mengenai Transparansi sebagai berikut:

Tabel 4.8
Tanggapan Responden mengenai Transparansi

| No. | Pernyataan | Scoring Responden mengenai Transparansi | | | | |
|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|
| | | STS | TS | N | S | SS |
| 1. | Inspektorat menyediakan informasi hasil pemeriksaan audit secara tepat waktu. | 12% | 3% | 16% | 47% | 22% |
| 2. | Inspektorat menyediakan informasi secara memadai. | 12% | - | 3% | 70% | 15% |
| 3. | Inspektorat menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. | 6% | 20% | 8% | 60% | 6% |
| 4. | Informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, susunan organisasi dan kejadian-kejadian penting yang mempengaruhi kondisi Inspektorat. | 12% | 12% | 14% | 42% | 20% |
| 5. | Tetap menjaga kerahasiaan Inspektorat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. | 12% | - | - | 53% | 35% |
| 6. | Setiap kebijakan didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada internal maupun eksternal Inspektorat. | 8% | 23% | 25% | 38% | 6% |

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Berdasarkan tanggapan responden mengenai Transparansi, untuk indikator pertama Inspektorat menyediakan informasi hasil pemeriksaan audit secara tepat waktu, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 17 orang (47%). Untuk indikator kedua Inspektorat menyediakan informasi secara memadai, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 25 orang (70%). Pada indikator ketiga Inspektorat menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sebagian besar memberikan jawaban setuju yakni 22 orang (60%). Indikator keempat Informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, susunan organisasi dan kejadian-kejadian penting yang mempengaruhi kondisi Inspektorat, sebagian besar responden

memberikan jawaban setuju yakni 16 orang (42%). Indikator kelima Tetap menjaga kerahasiaan Inspektorat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, rata-rata responden memberikan jawaban setuju yakni 19 orang (53%). Indikator keenam Setiap kebijakan didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada internal maupun eksternal Inspektorat, jawaban didominasi oleh jawaban setuju yakni 14 orang (38%).

b. Tanggapan Responden mengenai Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. Akan tetapi, hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalagunaan kewenangan. Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai akuntabilitas.

Tabel 4.9
Tanggapan Responden mengenai Akuntabilitas

| No. | Pernyataan | Scoring Responden mengenai Akuntabilitas | | | | |
|-----|--|--|----|-----|-----|-----|
| | | STS | TS | N | S | SS |
| 7. | Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang dan semua pegawai ditetapkan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, dan strategi Inspektorat. | 8% | - | 6% | 70% | 16% |
| 8. | Setiap bidang dan pegawai mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan peranan masing-masing. | 8% | - | 6% | 70% | 16% |
| 9. | Sistem pengendalian internal dilakukan secara efektif. | 6% | - | 12% | 70% | 12% |

| | | | | | | |
|-----|---|----|--|-----|-----|-----|
| 10. | Adanya sistem penghargaan dan sanksi (<i>reward and punishment system</i>) terhadap kinerja pegawai. | 8% | | 8% | 76% | 8% |
| 11. | Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, selalu berpegang pada etika dan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>) yang telah disepakati. | 8% | | 12% | 58% | 22% |

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Berdasarkan tanggapan responden mengenai akuntabilitas, pada indikator pertama Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang dan semua pegawai ditetapkan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, dan strategi Inspektorat, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 25 orang (70%). Indikator kedua Setiap bidang dan pegawai mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan peranan masing-masing, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 25 orang (70%). Indikator ketiga Sistem pengendalian internal dilakukan secara efektif, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 25 orang (70%). Indikator keempat Adanya sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) terhadap kinerja pegawai, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 27 orang (76%). Dan indikator kelima Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, selalu berpegang pada etika dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 21 orang (58%).

c. Tanggapan Responden mengenai Responsibility

Responsibility atau pertanggungjawaban adalah kesesuaian didalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai responsibility.

Tabel 4.10
Tanggapan Responden mengenai Responsibility

| No. | Pernyataan | Scoring Responden mengenai Responsibility | | | | |
|-----|---|---|----|-----|-----|-----|
| | | STS | TS | N | S | SS |
| 12. | Setiap bidang berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. | 8% | - | 6% | 70% | 16% |
| 13. | Adanya kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. | 8% | - | - | 70% | 22% |
| 14. | Adanya kepatuhan terhadap peraturan Inspektorat. | 8% | 6% | - | 76% | 10% |
| 15. | Melaksanakan tanggung jawab sosial peduli terhadap masyarakat dan lingkungan Inspektorat. | 8% | - | 12% | 72% | 8% |

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Berdasarkan tanggapan responden mengenai responsibility, untuk indikator pertama Setiap bidang berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 26 orang (70%). Indikator kedua Adanya kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 26 orang (70%). Indikator ketiga Adanya kepatuhan terhadap peraturan Inspektorat, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni sebanyak 29 orang (76%). Dan indikator keempat Melaksanakan tanggung jawab sosial peduli terhadap masyarakat dan lingkungan Inspektorat yakni 27 orang (72%).

d. Tanggapan Responden mengenai Independensi

Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang dicirikan oleh pendekatan integritas dan obyektivitas tugas profesionalnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor tidak hanya dituntut

untuk memiliki keahlian saja tetapi juga dituntut bersikap independen. Berikut ini tanggapan responden mengenai Independensi auditor pemerintahan.

Tabel 4.11
Tanggapan Responden mengenai Independensi

| No. | Pernyataan | Scoring Responden mengenai Independensi | | | | |
|-----|---|---|----|-----|-----|-----|
| | | STS | TS | N | S | SS |
| 16. | Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, setiap bidang selalu menghindari adanya dominasi oleh pihak manapun. | 8% | 3% | 8% | 43% | 38% |
| 17. | Setiap bidang dan pegawai mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan peranan masing-masing. | 8% | 6% | 3% | 63% | 20% |
| 18. | Sistem pengendalian internal dilakukan secara efektif. | 8% | 3% | 8% | 61% | 20% |
| 19. | Adanya sistem penghargaan dan sanksi (<i>reward and punishment system</i>) terhadap kinerja karyawan. | 8% | 3% | 16% | 53% | 20% |
| 20. | Adanya sistem penghargaan dan sanksi (<i>reward and punishment system</i>) terhadap kinerja karyawan. | 8% | 3% | 14% | 61% | 14% |

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Berdasarkan tanggapan responden mengenai independensi, indikator pertama Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, setiap bidang selalu menghindari adanya dominasi oleh pihak manapun, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 20 orang (43%). Indikator kedua, Setiap bidang dan pegawai mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan peranan masing-masing, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 23 orang (63%). Indikator ketiga Sistem pengendalian internal dilakukan secara efektif, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 22 orang (61%). Indikator keempat Adanya sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) terhadap kinerja karyawan, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni

19 orang (53%). Dan indikator kelima Adanya sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) terhadap kinerja karyawan, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 22 orang (61%).

e. Tanggapan Responden mengenai Kewajaran

Kewajaran umumnya dihubungkan dengan pengukuran dan pelaporan informasi melalui cara yang obyektif dan netral. Informasi adalah wajar jika informasi tersebut obyektif dan netral. Kewajaran paling tepat dijabarkan dalam literature dan persyaratan-persyaratan akuntansi professional sebagai pernyataan netralitas dari akuntan dalam pembuatan laporan keuangan. Berikut ini tanggapan responden mengenai kewajaran.

Tabel 4.12
Tanggapan Responden mengenai Kewajaran

| No. | Pernyataan | Scoring Responden mengenai Kewajaran | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|
| | | STS | TS | N | S | SS |
| 21. | Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat bagi kepentingan Inspektorat. | 3% | 8% | 3% | 72% | 14% |
| 22. | Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan. | 6% | 6% | 19% | 55% | 14% |
| 23. | Inspektorat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai dalam berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, <i>gender</i> , dan golongan fisik. | 6% | 3% | 8% | 61% | 20% |
| 24. | Adanya kebijakan kompensasi positif (penghargaan, insentif, dll) terhadap keberhasilan pegawai. | 6% | 6% | 3% | 61% | 25% |
| 25. | Adanya kebijakan kompensasi negatif (hukuman, teguran, dll) terhadap kinerja yang buruk. | 8% | 3% | 8% | 58% | 23% |

Berdasarkan tanggapan responden mengenai kewajaran, indikator pertama Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat bagi kepentingan Inspektorat, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 26 orang (72%). Indikator kedua Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 20 orang (55%). Indikator ketiga Inspektorat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai dalam berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan golongan fisik, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 22 orang (61%). Indikator keempat Adanya kebijakan kompensasi positif (penghargaan, insentif, dll) terhadap keberhasilan pegawai, sebagian responden memberikan jawaban setuju yakni 22 orang (61%). Dan indikator kelima Adanya kebijakan kompensasi negatif (hukuman, teguran, dll) terhadap kinerja yang buruk, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni 21 orang (58%).

4.1.4 Uji Kualitas Data

a. Pengujian Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Validitas konstruk diperoleh dengan menghitung korelasi antara masing-masing validitas dengan skor total dengan memakai rumus *correlate bivariate pearson* dengan menggunakan program SPSS 21 yang diperoleh dari kolom *corrected item total correlation*. Dimana menurut Sugiyono (2009:39) bahwa dalam penentuan

layak/tidaknya suatu item yang digunakan apabila memiliki nilai *corrected item total correlation* diatas dari nilai standard 0,30.

Secara statistik angka korelasi yang diperoleh harus diuji terlebih dahulu untuk menyatakan apakah nilai korelasi yang dihasilkan signifikan atau tidak. Jika angka korelasi yang diperoleh negative, maka hal ini berkaitan dengan pernyataan lainnya dan karena itu pernyataan tersebut valid atau tidak. Untuk hasil lengkap dari uji validitas terhadap peranan Inspektorat terhadap penerapan GGG di Prov. Sulawesi Selatan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Validitas X

| Variable | Item | Corrected Item- Total Correlation | Rstandar | keterangan |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|------------|
| Independensi | x1.1 | .408 | 0,30 | Valid |
| | x1.2 | .384 | | |
| | x1.3 | .315 | | |
| | x1.4 | .437 | | |
| | x1.5 | .344 | | |
| Kompetensi | x1.6 | .466 | 0,30 | Valid |
| | x1.7 | .653 | | |
| | x1.8 | .609 | | |
| | x1.9 | .384 | | |
| Program Audit Internal | x1.10 | .394 | 0,30 | Valid |
| | x1.11 | .580 | | |
| | x1.12 | .500 | | |
| | x1.13 | .605 | | |
| Pelaksanaan Audit Internal | x1.14 | .615 | 0,30 | Valid |
| | x1.15 | .519 | | |
| | x1.16 | .483 | | |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|------|-------|
| | x1.17 | .344 | | |
| Laporan Audit Internal | x1.18 | .437 | 0,30 | Valid |
| | x1.19 | .455 | | |
| | x1.20 | .513 | | |
| | x1.21 | .571 | | |

Tabel 4.14
Hasil Pengujian Validitas Y

| Variable | Item | <i>Corrected Item- Total Correlation</i> | Rstandar | keterangan |
|----------------|-------|--|----------|------------|
| Transparansi | Y1.1 | .382 | 0.30 | Valid |
| | Y1.2 | .394 | | |
| | Y1.3 | .519 | | |
| | Y1.4 | .502 | | |
| | Y1.5 | .505 | | |
| | Y1.6 | .560 | | |
| Akuntabilitas | Y1.7 | .428 | 0.30 | Valid |
| | Y1.8 | .329 | | |
| | Y1.9 | .571 | | |
| | Y1.10 | .455 | | |
| | Y1.11 | .322 | | |
| Responsibility | Y1.12 | .580 | 0.30 | Valid |
| | Y1.13 | .500 | | |
| | Y1.14 | .605 | | |
| | Y1.15 | .615 | | |
| Independensi | Y1.16 | .610 | 0.30 | Valid |
| | Y1.17 | .440 | | |
| | Y1.18 | .565 | | |
| | Y1.19 | .410 | | |
| | Y1.20 | .550 | | |
| Kewajaran | Y1.21 | .475 | 0.30 | Valid |
| | Y1.22 | .365 | | |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--|
| | Y1.23 | .605 | | |
| | Y1.24 | .573 | | |
| | Y1.25 | .676 | | |

Dari tabel hasil uji validitas untuk variable X (peranan inspektorat) dan variable Y (penerapan *Good Government Governance*) dengan jumlah total item 46 pertanyaan menunjukkan bahwa kedua variable tersebut sudah valid atau sah, alasannya karena memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* di atas dari 0.30. berarti dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini memiliki item-item keabsahan yang tinggi yang akan digunakan dalam pengolahan data uji hipotesis.

b. Pengujian Reabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator atau kuesioner yang digunakan dapat dipercaya atau handal sebagai alat ukur variable. Menurut Sugiyono (2009:54) bahwa reabilitas suatu indikator atau kuisisioner dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* (α), yaitu apabila *Cronbach's Alpha* (α) lebih besar ($>$) 0,60 maka indikator atau kuisisioner adalah reliable, sedangpan apabila nilai *Cronbach's Alpha* (α) lebih kecil ($<$) 0,60 maka indikator atau kuisisioner tidak reliable. Untuk melihat hasil dari uji reabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15 Hasil Uji Reabilitas

| Variable | Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items | Ket. |
|----------|------------------|--|------------|----------|
| X | 0.846 | 0.60 | 21 | Reliable |
| Y | 0.779 | 0.60 | 25 | Reliable |

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji reabilitas di atas, variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau kuisisioner yang digunakan untuk variabel-variabel semua dinyatakan handal atau dapat digunakan sebagai alat ukur (reliable).

4.1.5 Uji Hipotesis

a. Regresi Linier Sederhana (*Linier Regression*)

Analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variable bebas (X) dengan variable terikat (Y).). adapun persamaan regresi linier sederhana dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Hasil uji regresi linier sederhana terhadap variable bebas yaitu audit internal (inspektorat) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.16
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 21.264 | 10.957 | | 1.941 | .061 |
| | x | .465 | .145 | .483 | 3.217 | .003 |

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Berdasarkan tabel 4.15 persamaan linear sederhana, yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan uji regresi linear sederhana, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = 21,264 + 0,465X$$

Berikut ini akan disajikan penjelasan dari persamaan regresi sederhana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koefisien konstanta (b) sebesar 21,264 yang artinya bahwa variabel independen (peranan audit internal) diasumsikan tidak mengalami perubahan atau konstan maka nilai Y (penerapan *good government governance*) adalah sebesar 21,264%.
2. Koefisien regresi sebesar 0,465 yang diartikan bahwa peranan audit internal atau Inspektorat berpengaruh positif terhadap penerapan *good government governance*.

b. Uji Statistik t

Uji t atau *test of significance* digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh variable independen berpengaruh terhadap variable dependen bersifat menentukan (signifikacant) atau tidak, dengan criteria berdasarkan nilai signifikansi $<0,05$, maka variable independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen dan sebaliknya, jika nilai signifikansinya $>0,05$, maka variable independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen (Santoso, 2000:168).

Tabel 4.17
Uji Statistik t

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 21.264 | 10.957 | | 1.941 | .061 |
| | x | .465 | .145 | .483 | 3.217 | .003 |

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Berdasarkan tabel diatas, pengaruh dari masing-masing variabel peranan audit internal inspektorat (x) terhadap penerapan *good government governance*

(y) mempunyai arah yang positif. Variabel independen juga berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dengan melihat tabel diatas, maka analisis regresi linear sederhana dapat disimpulkan bahwa peranan audit internal (inspektorat) terhadap penerapan *good government governance* secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,217 dengan signifikansi 0,003. peranan audit internal (inspektorat) berpengaruh secara parsial terhadap penerapan *good government governance* karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan koefisiensi transformasi regresi sebesar 1,941, hal ini menunjukkan bahwa rasio peranan audit internal memiliki pengaruh positif terhadap penerapan *good government governance*.

Jadi, hipotesis “peranan audit internal berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance* dan pelaksanaan *Good Government Governance* pada Inspektorat Provinsi Sul-Sel sudah diterapkan dengan efektif” dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Andini (2012) yang menunjukkan bahwa peranan audit internal (inspektorat) berpengaruh secara parsial terhadap penerapan *good government governance* karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

4.2 Pembahasan

Variabel independen juga berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dengan melihat pembahasan diatas, maka analisis regresi linear sederhana dapat disimpulkan bahwa peranan audit internal (inspektorat) terhadap penerapan *good government governance* secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,217 dengan signifikansi 0,003. Hasil penelitian menunjukkan koefisiensi transformasi

regresi sebesar 1,941, hal ini menunjukkan bahwa rasio peranan audit internal memiliki pengaruh positif terhadap penerapan *good government governance*.

Jadi, hipotesis “peranan audit internal berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance* dan pelaksanaan *Good Government Governance* pada Inspektorat Provinsi Sul-Sel sudah diterapkan dengan efektif” dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Andini (2012) yang menunjukkan bahwa peranan audit internal (inspektorat) berpengaruh positif terhadap *good goverment governance* karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan atas Peranan Inspektorat terhadap Penerapan *Good Government Governance* pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Peranan Inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good government governance*, hal ini terlihat dari hasil uji regresi yang menunjukkan nilai positif dan nilai signifikan.
2. Inspektorat berperan penting terhadap penerapan *good government governance* pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, yaitu telah menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan kinerja; pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; serta pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan. Pengawasan tersebut telah dilakukan terhadap semua pelaksanaan tugas unsur kementerian agar dapat berjalan sesuai dengan rencana.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan atas Peranan Inspektorat terhadap Penerapan *Good Government Governance* pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, penulis mencoba untuk mengemukakan saran sebagai bahan pertimbangan antara lain:

1. Inspektorat harus lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas, artinya seluruh personil dipemerintah pada setiap level berusaha menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan pemerintahan dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi atau kelompok, dengan demikian penerapan *Good Government Governance* bisa diterapkan lebih baik.
2. Inspektorat harus meningkatkan kepercayaan publik. Publik dalam hal ini dapat berupa mitra pemerintah, baik sebagai investor, pemasok, pelanggan, kreditor, maupun masyarakat umum. Bagi investor dan kreditor penerapan *Good Government Governance* bagi mitranya adalah suatu hal yang mutlak untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelepasan dana investasi maupun kreditnya. Dengan menerapkan prinsip *Good Government Governance*, maka baik investor maupun kreditor akan merasa lebih aman karena pemerintah dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan semua pihak, dan bukan pihak tertentu saja.
3. Inspektorat harus lebih menerapkan prinsip keadilan, dimana tidak ada pihak yang istimewa dan tidak diistimewakan, karena apabila pemerintahan dijalankan dengan tidak adil maka akan menimbulkan

pertentangan antara pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan sehingga dapat mengancam kewibawaan pemerintahan daerah.

Daftar Pustaka

- Andayani, Wuryan. 2008. *Audit Internal* edisi 1. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Andini Lopang. 2012. *Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank Sulselbar*. Makassar: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Boynton, William C, Raymon N. Johnson, Walter G. Kell. 2001. *Modern Auditing*, Jilid I. Edisi Ketujuh. Penerjemah: Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setyo Budi. Jakarta: penerbit Erlangga.
- Dan M. Guy, C. Wayne A., Alan J. Winters. 2002. *Auditing*, Jilid I. Edisi kelima. Penerjemah: Sugiyarto. Jakarta: Erlangga.
- Falah, S. 2005. *Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika terhadap Sensitivitas Etika*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi 3. Undip. Semarang.
- Lawrence B. Sawyer, Mortimer A. Dittenhofer, James H. Scheiner. 2005. *"Sawyer's Internal Auditing"*. Penerjemah: Desi Addhariani. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyadi. 2005. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Resa Dewitasari. 2009. *Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah.
- Santoso, Singgih. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputerindo.
- Sawyer, Lawrence. 2009. *The Practice of Modern Internal Auditing*. The Institute of Internal Auditors.
- Sukrisno Agoes 2004:221. *Auditing* edisi 6 buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Tjitrosidojo, Sumardjo.1985. *Kamus istilah akuntansi*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tugiman, Hiro (2006:11). *Standar Profesional Audit Internal*. Jakarta: Kanisius.

Yayasan Pendidikan Internal Auditor. 2007. Sertifikat QIA.

LAMPIRAN

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Ita Rezki Amaliah
 Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 26 Desember 1992
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Rumah : Jl. Mannuruki 2 no. 100
 No. Telepon : 085299521712
 Alamat E-mail : itharezky@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1996-1998 : TK Sulawesi Makassar
 1998-2004 : SDN Kompleks IKIP Makassar
 2004-2007 : SMP Negeri 6 Makassar
 2007-2010 : SMA Negeri 11 Makassar
 2014 : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar

Pendidikan Nonformal/Training/Seminar

1. Kursus bahasa Inggris di Philipina Indonesia Amerika (PIA) International School (2008-2009)
2. Kursus Akuntansi di Adiputeri (2010)
3. Pelatihan *Basic Study Skill*, Hasanuddin University (2010)
4. Latihan Kepemimpinan Tingkat Pertama (LK 1), IMA FEB-UH (2011)

Riwayat Organisasi

1. Palang Merah Remaja (PMR) SMA Negeri 11 Makassar
2. Keluarga Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) FEB-UH

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 2 Mei 2014

ITA REZKI AMALIAH

KUEISIONER

Petunjuk Pengisian

Berikut adalah kuesioner mengenai peranan audit internal pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, yang berjudul **“Peranan Inspektorat Terhadap Penerapan *Good Government Governance* pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan”**. Mohon bapak/ibu/saudara(i) menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda check list (✓) pada salah satu di antara pilihan jawaban yang menggambarkan kondisi yang paling mendekati atau sesuai dengan kondisi anda. Adapun petunjuk sebagai berikut:

STS = Sangat tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

Mohon bapak/ibu/saudara(i) menjawab pertanyaan berikut dengan memberikan keterangan tertulis dan tanda check list seperlunya:

No. Responden : (diisi oleh peneliti)

Jenis Kelamin : () laki-laki () perempuan

Jabatan :

| No. | Pernyataan | STS | TS | N | S | SS |
|------------------------|---|-----|----|---|---|----|
| I. INDEPENDENSI | | | | | | |
| 1. | Kedudukan unit internal audit terpisah dari bagian-bagian yang diperiksanya. | | | | | |
| 2. | Auditor internal pernah mendapatkan kesulitan dalam mewawancarai orang-orang yang bekerja pada bagian yang sedang di audit. | | | | | |
| 3. | Auditor internal bertanggung jawab kepada unit internal audit. | | | | | |
| 4. | Auditor internal mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah seorang pimpinan atau staf | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | dari objek yang sedang di audit. | | | | | |
| 5. | Auditor internal mempunyai akses kepada komite pengawasaan | | | | | |
| II. KOMPETENSI | | | | | | |
| 6. | Auditor internal memiliki latar belakang pendidikan kecakapan professional yang memadai dalam hal audit. | | | | | |
| 7. | Auditor internal memiliki pengalaman dibidang audit. | | | | | |
| 8. | Auditor internal mempunyai kemampuan komunikasi dengan orang lain secara efektif. | | | | | |
| 9. | Auditor internal teliti dalam melaksanakan tugasnya | | | | | |
| III. PROGRAM AUDIT INTERNAL | | | | | | |
| 10. | Dalam program audit terdapat evaluasi terhadap kegiatan operasional audit. | | | | | |
| 11. | Batasan pemeriksaan ditetapkan secara jelas. | | | | | |
| 12. | Program pemeriksaan dilakukan review secara terus menerus. | | | | | |
| 13. | Program audit disusun sebelum audit dilakukan. | | | | | |
| IV. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL | | | | | | |
| 14. | Pelaksanaan audit didasarkan pada program yang telah disusun sebelumnya. | | | | | |
| 15. | Tahap-tahap pelaksanaan audit mendapatkan pengawasan yang efektif. | | | | | |
| 16. | Pelaksanaan audit dilakukan minimal 6 bulan sekali. | | | | | |
| 17. | Dalam pelaksanaan audit dilakukan evaluasi terhadap risiko yang berkaitan dengan sistem informasi, efektifitas dan efisiensi operasi sesuai dengan hukum, undang-undang dan keamanan asset. | | | | | |
| V. LAPORAN AUDIT INTERNAL | | | | | | |
| 18. | Laporan dikeluarkan setelah audit selesai. | | | | | |
| 19. | Laporan disusun secara objektif, singkat dan jelas. | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 20. | Laporan audit memberikan arah bagi manajemen untuk mengambil keputusan. | | | | | |
| 21. | Laporan audit menyajikan temuan-temuan audit hasil pelaksanaan audit. | | | | | |

KUEISIONER

Petunjuk Pengisian

Berikut adalah kuesioner mengenai peranan audit internal pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, yang berjudul **“Peranan Inspektorat Terhadap Penerapan *Good Government Governance* pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan”**. Mohon bapak/ibu/saudara(i) menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda check list (✓) pada salah satu di antara pilihan jawaban yang menggambarkan kondisi yang paling mendekati atau sesuai dengan kondisi anda. Adapun petunjuk sebagai berikut:

STS = Sangat tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

Mohon bapak/ibu/saudara(i) menjawab pertanyaan berikut dengan memberikan keterangan tertulis dan tanda check list seperlunya:

No. Responden : (diisi oleh peneliti)

Jenis Kelamin : () laki-laki () perempuan

Jabatan :

| No. | Pernyataan | STS | TS | N | S | SS |
|------------------------|---|-----|----|---|---|----|
| I. TRANSPARANSI | | | | | | |
| 1. | Inspektorat menyediakan informasi hasil pemeriksaan audit secara tepat waktu. | | | | | |
| 2. | Inspektorat menyediakan informasi secara memadai. | | | | | |
| 3. | Inspektorat menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. | | | | | |
| 4. | Informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, susunan organisasi dan kejadian-kejadian penting yang mempengaruhi kondisi Inspektorat. | | | | | |
| 5. | Tetap menjaga kerahasiaan Inspektorat sesuai dengan | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | perundang-undangan yang berlaku. | | | | | |
| 6. | Setiap kebijakan didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada internal maupun eksternal Inspektorat. | | | | | |
| II. AKUNTABILITAS | | | | | | |
| 7. | Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang dan semua pegawai ditetapkan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, dan strategi Inspektorat. | | | | | |
| 8. | Setiap bidang dan pegawai mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan peranan masing-masing. | | | | | |
| 9. | Sistem pengendalian internal dilakukan secara efektif. | | | | | |
| 10. | Adanya sistem penghargaan dan sanksi (<i>reward and punishment system</i>) terhadap kinerja pegawai. | | | | | |
| 11. | Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, selalu berpegang pada etika dan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>) yang telah disepakati. | | | | | |
| III. RESPONSIBILITY | | | | | | |
| 12. | Setiap bidang berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. | | | | | |
| 13. | Adanya kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. | | | | | |
| 14. | Adanya kepatuhan terhadap peraturan Inspektorat. | | | | | |
| 15. | Melaksanakan tanggung jawab sosial peduli terhadap masyarakat dan lingkungan Inspektorat. | | | | | |
| IV. INDEPENDENSI | | | | | | |
| 16. | Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, setiap bidang selalu menghindari adanya dominasi oleh pihak manapun. | | | | | |
| 17. | Setiap bidang dan pegawai mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan peranan masing-masing. | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 18. | Sistem pengendalian internal dilakukan secara efektif. | | | | | |
| 19. | Adanya sistem penghargaan dan sanksi (<i>reward and punishment system</i>) terhadap kinerja karyawan. | | | | | |
| 20. | Adanya sistem penghargaan dan sanksi (<i>reward and punishment system</i>) terhadap kinerja karyawan. | | | | | |
| V. KEWAJARAN | | | | | | |
| 21. | Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat bagi kepentingan Inspektorat. | | | | | |
| 22. | Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan. | | | | | |
| 23. | Inspektorat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai dalam berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, <i>gender</i> , dan golongan fisik. | | | | | |
| 24. | Adanya kebijakan kompensasi positif (penghargaan, insentif, dll) terhadap keberhasilan pegawai. | | | | | |
| 25. | Adanya kebijakan kompensasi negatif (hukuman, teguran, dll) terhadap kinerja yang buruk. | | | | | |

TABEL TABULASI

Tabel Tabulasi untuk Peranan Inspektorat (x)

| no | X: Peranan Inspektorat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 78 |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 82 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 83 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 78 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 83 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81 |
| 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 87 |
| 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 96 |
| 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 |
| 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 |
| 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 72 |
| 14 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 94 |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 96 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 79 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 84 |
| 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 86 |
| 19 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 88 |
| 20 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 101 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 98 |
| 23 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 87 |
| 24 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 93 |
| 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 87 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81 |
| 28 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 86 |
| 30 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 |
| 31 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 88 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 88 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 82 |
| 34 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 82 |
| 35 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 82 |

Tabel Tabulasi untuk Penerapan GGG

| no | y: good government governance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 103 |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 112 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 107 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 102 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 102 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 101 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 97 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 100 |
| 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 106 |
| 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 110 |
| 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 74 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 96 |
| 14 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 106 |
| 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 114 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 90 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 92 |
| 18 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 111 |
| 19 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 111 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 104 |
| 21 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 108 |
| 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 101 |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 98 |
| 24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 98 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 110 |
| 24 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 104 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 98 |
| 28 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 92 |
| 29 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 94 |
| 30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 102 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|
| 31 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 98 | |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 111 |
| 33 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 86 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 98 |
| 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 93 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 97 |

STATISTIK DESKRIPTIF

UJI RELIABILITAS X

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 30 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 30 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
|------------------|--|------------|
| .846 | .854 | 21 |

UJI VALIDITAS X

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Squared Multiple Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| x1.1 | 81.6000 | 57.903 | .408 | . | .840 |
| x1.2 | 82.0667 | 63.306 | .384 | . | .858 |
| x1.3 | 81.7667 | 59.357 | .315 | . | .844 |
| x1.4 | 83.2333 | 57.771 | .437 | . | .857 |
| x1.5 | 82.1667 | 60.971 | .344 | . | .850 |
| x1.6 | 81.7000 | 57.252 | .466 | . | .838 |
| x1.7 | 81.7000 | 54.424 | .653 | . | .830 |
| x1.8 | 81.9000 | 53.541 | .609 | . | .831 |
| x1.9 | 81.6333 | 58.999 | .384 | . | .842 |
| x1.10 | 81.9000 | 57.197 | .394 | . | .841 |
| x1.11 | 81.6000 | 55.283 | .580 | . | .833 |
| x1.12 | 81.6667 | 56.782 | .500 | . | .837 |

| | | | | | |
|-------|---------|--------|------|---|------|
| x1.13 | 81.6000 | 54.179 | .605 | . | .831 |
| x1.14 | 81.5333 | 55.637 | .615 | . | .832 |
| x1.15 | 81.4000 | 56.869 | .519 | . | .836 |
| x1.16 | 82.3333 | 52.851 | .483 | . | .839 |
| x1.17 | 81.8333 | 59.040 | .344 | . | .843 |
| x1.18 | 81.3667 | 58.999 | .437 | . | .840 |
| x1.19 | 81.3667 | 58.861 | .455 | . | .840 |
| x1.20 | 81.4333 | 58.461 | .513 | . | .838 |
| x1.21 | 81.5333 | 55.223 | .571 | . | .833 |

UJI RELIABILITAS Y

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 30 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 30 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
|------------------|--|------------|
| .779 | .774 | 25 |

UJI VALIDITAS Y

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Squared Multiple Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

| | | | | | |
|-------|---------|--------|------|---|------|
| Y1.1 | 97.3333 | 60.782 | .382 | . | .767 |
| Y1.2 | 97.2000 | 64.717 | .394 | . | .779 |
| Y1.3 | 97.7333 | 66.478 | .519 | . | .789 |
| Y1.4 | 97.2667 | 59.030 | .502 | . | .759 |
| Y1.5 | 96.9667 | 58.723 | .505 | . | .758 |
| Y1.6 | 97.6000 | 67.697 | .560 | . | .796 |
| Y1.7 | 97.2667 | 61.995 | .428 | . | .765 |
| Y1.8 | 97.0667 | 64.409 | .329 | . | .772 |
| Y1.9 | 97.2000 | 67.959 | .571 | . | .788 |
| Y1.10 | 97.2667 | 67.168 | .455 | . | .785 |
| Y1.11 | 97.1333 | 63.982 | .322 | . | .771 |
| Y1.12 | 97.1000 | 67.403 | .580 | . | .788 |
| Y1.13 | 97.0000 | 64.552 | .500 | . | .777 |
| Y1.14 | 97.2333 | 65.771 | .605 | . | .780 |
| Y1.15 | 97.3333 | 65.126 | .615 | . | .775 |
| Y1.16 | 97.1333 | 60.120 | .610 | . | .756 |
| Y1.17 | 97.2667 | 59.926 | .440 | . | .763 |
| Y1.18 | 97.0667 | 59.513 | .565 | . | .756 |
| Y1.19 | 97.2333 | 60.806 | .410 | . | .765 |
| Y1.20 | 97.2333 | 62.737 | .550 | . | .773 |
| Y1.21 | 97.1667 | 66.213 | .475 | . | .780 |
| Y1.22 | 97.3667 | 62.585 | .365 | . | .769 |
| Y1.23 | 97.2667 | 59.099 | .605 | . | .754 |
| Y1.24 | 97.4333 | 59.013 | .573 | . | .755 |
| Y1.25 | 97.3333 | 59.195 | .676 | . | .752 |

Variables Entered/Removed^a

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|-------|-------------------|-------------------|--------|
| 1 | x ^b | . | Enter |

a. Dependent Variable: y

b. All requested variables entered.

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 21.264 | 10.957 | | 1.941 | .061 |
| | x | .465 | .145 | .483 | 3.217 | .003 |

a. Dependent Variable: y